

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asyiah, Nur. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basan, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Budianto, M. S. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djatmika, Sastra dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. 2018. *Hukum kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mamudji, S. S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- MD, M. Mahfud. 1998. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1982. *Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukhlis, S. 2012. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Munaf, Y. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh.
- Munaf, Y. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Laksbang.
- Saputra, M. N. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Satoto, S. 2004. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- SF, Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudrajat Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triatmojo, Sudiby. 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Ghalia Indonesia;

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor: 850/04237.38 tentang Tata Cara Permintaan Dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara

C. Jurnal

- Akbar Bram Maha Putra, I. G. (2015). Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah*, 3.
- Badan Kepegawaian Negara. 2018. *Dikotomi Sistim Merit Dan Politisasi Birokrasi Dalam Pengangkatan Jabatan ASN. Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian. Civil Apparatus Policy Brief.*
- Fahrani, N. S. 2015. Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Pemerintah Kota Banda Aceh . *Civil Service*, 56.
- Harahap, D. R. 2018. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin. *Seminar Nasional P4M UNAS*, 95.
- Ida Ayu Putri Wulandari, I. R. 2019. Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 4.
- Irfani, N. 2021. Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi*, 16(3), 313.
- Onibala, D. A. 2019. Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Paramitha, N. 2019. *Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.* Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Pujiraharjo, H. S. 2015. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Solusi Dalam Rekrutmen Pegawai Dari Pegawai Non PNS ASN. *Civil Service*, 23.

Putranto, A. S. 2015. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Pengertian Dan Urgensinya . *Civil Service*, 4.

Rahmawanto, A. 2017. Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 29.

Z, A. 2020. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik . *Jurnal Yurispruden*, 219.

D. Internet

Gusman. (2021, Maret 30). *Manajemen/Administrasi Kepegawaian*. Retrieved from Kemenag Bengkulu Web Site: <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/ArtikelKaryaIlmiah/raqc1357702311.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Cuti*, <https://kbbi.web.id/cuti>, (diakses pada 4 April 2021)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Kriteria*, <https://kbbi.web.id/kriteria>, (diakses pada 4 November 2021)